

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI TENTANG PEMBELAJARAN
TATAP MUKA TERBATAS PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI SMP NEGERI 1 JEPON KABUPATEN BLORA
JAWA TENGAH

Oleh:
Sulasih

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Jawa Tengah
E-mail: asihsulasih7363@gmail.com

Abstract

Education is one of the most important aspects in life in order to form quality human resources and be able to keep up with the current development of an increasingly advanced era. The purpose of the study was to describe the implementation of the Regent's Policy on Limited Face-to-Face Learning at SMP Negeri 1 Jepon during the 2019 Coronavirus Disease Pandemic, Blora Regency, Central Java. According to Edwards III, there are four factors that influence public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure.. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation on school residents. The results showed that there was communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The conclusion of the Implementation of the Regent's Policy on Limited Face-to-Face Learning at SMP Negeri 1 Jepon during the 2019 Coronavirus Disease Pandemic, Blora Regency, Central Java, is good.

Keywords: Communication, resources, disposition, bureaucratic structure.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan aset masa depan yang harus dimiliki oleh setiap seseorang untuk mengembangkan pengetahuan maupun keterampilan guna memahami disiplin ilmu agar dapat mengikuti perkembangan zaman di era teknologi yang semakin maju. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dalam kehidupan manusia.

Penyelenggaraan pendidikan formal harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang memerlukan jenis keterampilan dan keahlian. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik baik secara langsung yang seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media, model serta metode pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif yang mewarnai

interaksi yang terjadi baik antara guru dengan peserta didik maupun interaksi antar peserta didik dengan peserta didik. Pandemi virus corona disease (COVID) 19 di Indonesia memaksa aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan. Tidak ingin penularan virus corona disease (COVID) 19 semakin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Saat ini merupakan masa transisi dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menuju ke Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Untuk mengatasi wabah pandemi virus corona disease (COVID)19 semua negara menerapkan sebuah tindakan salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing yaitu jarak sosial yang telah dibuat untuk meminimalisir terjadinya interaksi dalam jumlah yang lebih banyak (Wilder-Smith & Freedman, 2020:2).

Demikian pula di SMP Negeri 1 Jepon mentaati kebijakan dari Bupati Blora tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. Meskipun peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas tetap memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan tambahan materi pelajaran, tugas, dan pelaksanaan penilaian harian dari guru. Berdasarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas seorang guru harus memperhatikan keberhasilan dari pembelajaran dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini. SMP Negeri 1 Jepon telah mengimplementasikan pembelajaran tatap muka terbatas

dengan mentaati peraturan pemerintah secara ketat daerah sesuai protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus, pembelajaran harus tetap dilaksanakan agar peserta didik tetap dapat memperoleh materi pelajaran selagi masa pandemi tengah berlangsung.

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMP Negeri 1 Jepon meliputi pembelajaran Luring namun tetap dengan memanfaatkan daring untuk penugasan dan penilaian harian. Hal ini dilakukan karena Pembelajaran Tatap Muka Terbatas waktu pembelajarannya tidak sesuai dengan ketentuan kurikulum 13 tetapi dengan kurikulum darurat. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini di terapkan di SMP Negeri 1 Jepon mulai bulan September 2021 sampai sekarang. Untuk tingkat partisipasi siswa dalam pembelajarannya mencakup 95 %. Sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut antara lain

- a. SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat hanya untuk zona hijau;
- b. SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau dan kuning; serta
- c. Penyesuaian SKB Empat Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat

izin dari pemerintah daerah, tanpa melihat zonasi.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Coronavirus Desiase of 2019 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Suwardi (2022) kerangka kerja menejemen evaluasi kebijakan public mengikuti pola sistem. Pola sistem menejemen evaluasi kebijakan terdiri dari komponen masukan (*input*), proses konversi (*process conversion*), luaran (*output*), dan dampak (*outcome*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Brinkerhoff, R.O., et.al, (1983) Menejemen evaluasi kebijakan dilakukan pada tiga jenis pendekatan evaluasi, yaitu (1) goal-based evaluation, (2) process-based evaluation, dan (3) outcome-based evaluation. Proses base evaluation termasuk di dalmnya adalah mengevaluasi komponen input dalam proses untuk menghasilkan output dari kebijakan public.

Pendekatan teori yang peneliti gunakan adalah dengan Teori Edward. Implementasi kebijakan harus memperhatikan empat isu pokok, yaitu:

A. Faktor Komunikasi . Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan

komunikasi kebijakan dengan memerhatikan:

- a. Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
 - b. Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
 - c. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.
- B. Faktor Sumber Daya Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:
- a. Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing masing unit dalam hal menangani masalah media tradisional adalah Bidang Diseminasi Informasi (Dinas Pendidikan /Kabupaten/Kota);
 - b. Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
 - c. Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan

- perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan;
- d. Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan, berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/Perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.
- C. Faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana terhadap Kebijakan
Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku warga sekolah terhadap kebijakan Dinas Pendidikan, yang dilihat dari tiga aspek, yaitu:
- a. Efek disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
 - b. Staffing birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
 - c. Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.
- D. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi setingkat Dinas merupakan bagian tugas dalam membantu wilayah pemerintahan di daerah, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Dinas Pendidikan kabupaten Blora,. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Procedures-SOP), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam;
 - b. Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Coronavirus Desiase of 2019 di SMP Negeri 1

Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi.

Djam'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar gambar gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil secara langsung berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada subjek/informan penelitian yang memahami topik penelitian dan melalui observasi langsung dilapangan terkait dengan topik Implementasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Coronavirus Desiase of 2019 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi-informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara.

Selain itu dapat berupa jurnal, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, laporan kegiatan, arsip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Teknik pengambilan data dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 218). Catherine Marshall, Gretche B. Rossman dalam Sugiyono (2012: 225) mengemukakan bahwa "the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are,

participation in the setting, direct observation, indepth interviewing, document review”. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi.

- (1) Wawancara, Moleong (2012:186) menjelaskan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara diharapkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tak berstruktur (unstructured interview). Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan Implementasi Surat Edaran Kebijakan Bupati Blora tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Coronavirus Desiase of 2019 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman

wawancara, namun masih berhubungan dengan topik penelitian.

- (2) Dokumentasi, pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sugiyono (2012:240) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sugiyono (2012:240) juga menyebutkan bahwa hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh data-data yang akurat. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi covid-19, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi covid-19, laporan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi covid-19, dan berbagai dokumen lain yang mendukung. Teknik nalisis data, Bogdan & Biklen dalam Moleong (2012:248) mengidentifikasi analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman (2009:19) membagi alur analisis

data kualitatif kedalam tiga kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling berinteraksi dalam sebuah siklus pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

Menurut pada teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 2009:16).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga penganalisis dapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis (Miles & Huberman, 2009:17-18).

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2012:253). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga makna-makna yang muncul dapat teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya (Miles & Huberman, 2009:19).

Pembahasan

SMP Negeri 1 Jepon berlokasi di desa Sesu Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tepatnya di Jalan Raya 93A Jepon Blora Jawa Tengah, berdiri pada tahun 1977. Mengacu keputusan bersama (SKB) 6 Menteri tentang pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan dan surat edaran Bupati nomor: 443.5/3071/2021 SMP Negeri 1 Jepon melaksanakan kebijakan tersebut. Peserta didik di SMP Negeri 1 Jepon saat ini jumlahnya mencapai 954 peserta

didik. Dengan banyaknya peserta didik yang memiliki bakat seni dan olah raga maupun sains maka mempunyai peluang untuk meningkatkan prestasi di bidang seni dan olah raga serta sains.

Pada setiap kompetisi SMP Negeri 1 Jepon selalu meraih prestasi. Proses pembelajaran SMP Negeri 1 Jepon Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai dengan Kurikulum 2013 (Kurikulum Darurat) menggunakan 6 hari efektif menerapkan tatap muka terbatas. PP No. 19 Tahun 2005 mengamanatkan Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Rumusan visi sekolah wajib mengilhami tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar karena visi sekolah dirumuskan dalam rangka mencapai kedua tujuan tersebut. Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, BAB II Pasal 3). Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Visi SMP Negeri 1 Jepon: **“Si Budiman”** (Berprestasi Berbudai Mandiri dan

Tanggap Lingkungan Berdasarkan Imitasi dan Iptek) yakni :

1. Mewujudkan komponen standart nasional pendidikan yang terdiri atas standart kompetensi kelulusan. Standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian (8 standar).
2. Mewujudkan peningkatan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non akademik.
3. Mewujudkan budaya disiplin, jujur, santun, tanggung jawab, dan mandiri bagi seluruh warga sekolah.
4. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
5. Mewujudkan peningkatan kemampuan pemanfaatan iptek pada seluruh warga sekolah.
6. Mewujudkan budaya bersih, rindang, aman, sehat, rapi, dan indah pada lingkungan sekolah.
7. Mewujudkan sikap cinta lingkungan dan budaya lokal dan nasional.
8. Mewujudkan sikap tanggap dan peduli lingkungan hidup dan budaya ramah lingkungan terhadap semua warga sekolah.
9. Mewujudkan lingkungan sekolah yang mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam (sekolah berwawasan lingkungan).

Tujuan pendidikan SMP Negeri 1 Jepon mengacu pada tujuan umum pendidikan nasional maupun

pendidikan dasar secara khusus, sesuai dengan visi dan misi sekolah, SMP Negeri 1 Jepon menetapkan tujuan pada akhir pelajaran tahun 2021/2022 adalah :

1. Membina berkembangnya akhlak/ kepribadian siswa.
2. Mengembangkan kreatifitas siswa.
3. Meningkatkan optimalisasi prestasi siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Menyiapkan siswa untuk dapat kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yang diinginkan.
5. Membina siswa agar punya kemandirian.
6. Meningkatkan kecintaan siswa terhadap lingkungan.
7. Menumbuhkan sikap tanggap serta cinta terhadap lingkungan dan budaya lokal khususnya seni batik.
8. Menumbuhkan sikap tanggap dan peduli, cinta lingkungan hidup serta berbudaya ramah lingkungan pada seluruh warga sekolah.
9. Menumbuhkan lingkungan sekolah yang mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Mengacu pada visi dan misi satuan pendidikan, tujuan pendidikan dasar, serta tujuan pendidikan nasional, tujuan satuan pendidikan SMP Negeri 1 Jepon pada tahun pelajaran 2021/ 2022 adalah :

1. Terwujudnya perkembangan akhlak/ kepribadian siswa. santun dan agamis.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang olah raga.
4. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang seni.
5. Menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatifitas.
6. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang IT.
7. Memperoleh kelulusan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 100 %.
8. Meningkatnya Nilai Ujian Nasional.
9. Meraih kejuaraan di bidang non akademik.
10. Meraih kejuaraan di bidang akademik.
11. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, asri, sehat, nyaman dan menyenangkan.
12. Terciptanya siswa mandiri.
13. Terbentuknya warga sekolah yang religius, nasionalis, mandiri, dan suka bergotong royong.

Dalam kegiatan pembelajaran, perencanaan menjadi awal proses sebelum pelaksanaan dan penilaian. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien jika direncanakan dengan baik (Novalita,2014). Perencanaan yang dibuat dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengacu pada silabus dan kurikulum yang berlaku, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan. RPP dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada satuan tingkat pendidikan dasar disusun berdasarkan tema/subtema

dan KD yang dilaksanakan dalam satu atau lebih pertemuan.

Guru akan merencanakan jumlah pertemuan dengan melihat muatan materi dan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Kondisi pandemi Covid-19 ini, mengharuskan guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda karena faktor keterbatasan waktu. Setelah tahap perencanaan kemudian masuk kedalam tahap pelaksanaan, dalam pelaksanaan pembelajaran guru membagi kelas menjadi 2 shift, yaitu kelas pagi dan kelas siang. Hal ini disesuaikan dengan surat edaran oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Proses pembelajaran berlangsung normal, dan sesuai dengan alur RPP yang telah dibuat oleh guru. Tahap yang terakhir dalam pembelajaran yaitu tahap penilaian.

Tahap penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik (Syaifuddin, 2017). Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, setiap guru juga melakukan evaluasi, yaitu melakukan penilaian sikap dan penilaian materi seperti melaksanakan ulangan harian, Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) seperti halayak umumnya. Dengan demikian setiap proses dalam pembelajaran tidak ada yang tertinggal, dari mulai perencanaan, pelaksanaan serta tahap evaluasi atau penilaian meskipun pada kondisi pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam Implementasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap

Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid -19 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah. adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards.

Menurut pandangan Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengaruh keempat faktor ini pada Implementasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid -19 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid -19 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal

terjadi antar pejabat Dinas Pendidikan yaitu pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Blora dengan Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa sekolah. Di SMP Negeri 1 Jepon telah terjadi penyampaian komunikasi dari kepala sekolah kepada semua pegawai dengan baik.

Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan guna tujuan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas agar dapat tercapai dan terwujud. Indikator selanjutnya adalah kejelasan komunikasi, kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah menyebutkan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan oleh sekolah sudah baik, hal ini dapat terlihat dari sosialisasi yang jelas dan peserta didik mengetahui mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas yang meliputi daring dan luring tersebut. Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah kepala

sekolah kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi telah konsisten dan jelas, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut :

- a) Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai di SMP Negeri 1 Jepon berjumlah 62 orang, yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 4 guru bimbingan konseling, 46 guru mata pelajaran dan 11 staf yang terjun ke lapangan. Sumber daya pegawai SMP Negeri 1 Jepon telah memadai dan mumpuni, karena dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini telah diadakan pendidikan dan pelatihan
- b) Sumber Daya, sumber daya anggaran dalam menunjang pelaksanaan tatap muka terbatas berupa ketersediaan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Untuk itu SMP Negeri 1 Jepon dalam memenuhi sarana prasarana pembelajaran tatap muka

terbatas tersebut menyediakan masker, tissue, handsanitizer, sabun, tempat cuci tangan, pengukur suhu/thermogan, spanduk tentang poster prokes, pengadaan vaksinasi 1,2. Sedangkan guru dan karyawan membawa alat tulis sendiri (Handsanitiser, spidol, pen, dan penghapus) yang sudah disediakan oleh sekolah. Dalam pembelajaran tatap muka terbatas bekal harus harus dibawa sendiri-sendiri dari rumah karena kantin tidak boleh buka. Hal ini dilakukan untuk menimalisir penularan covid-19 akibat dari kerumunan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Edward III (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari:

a) Tingkat kepatuhan bapak ibu guru dan karyawan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas mencapai 100 %. Bapak ibu sadar akan kesehatan warga sekolah semua. Sedangkan tingkat kepatuhan peserta didik mencapai 95 %. Waktu berangkat sekolah masih terdapat peserta didik yang tidak memakai masker, pada waktu pulang terkadang timbul kerumunan. Namun semua itu segera diatasi bersama-sama sehingga

sesuai dengan protokol kesehatan.

b) Pembinaan guru dari kepala sekolah bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan lancar dan penunjukan guru piket di SMP Negeri 1 Jepon untuk melaksanakan piket di masing-masing pintu gerbang pembelajaran tatap muka terbatas, sebagai wujud keseriusan ikut berperan dalam mencegah penularan covid -19 di pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi ini.

c) Insentif Pendapat George C. Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Di SMP Negeri 1 Jepon pegawai yang kreatif dalam pembelajarannya mendapatkan reward berupa sanjungan dan pemberian

sarana proses untuk semua guru serta karyawan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi pada SMP Negeri 1 Jepon Kab. Blora tergambar dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Sekolah sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Sekolah. Di SMP Negeri 1 Jepon telah memiliki SOP dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu bapak ibu guru melaksanakan piket pagi dan siang pada saat pergantian sesi menyambut kehadiran serta mengawasi peserta didik untuk selalu mentaati protokol kesehatan.

Peran Kepala sekolah SMP Negeri 1 Jepon sangat penting dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang baik sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran kepala sekolah melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jumlah guru dan tenaga kependidikan di SMP N 1 Jepon sudah sesuai, maka pelayanan pendidikan di SMP N 1 Jepon berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sekolah sudah menyiapkan semua sarana dan

prasarananya, selain itu juga harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

Peran guru Bimbingan Konseling dalam pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Jepon adalah selalu memberikan layanan kepada peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dalam menyelesaikan penugasan, penilaian yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Apabila ada siswa tidak mengikuti pembelajaran, guru Bimbingan Konseling melakukan homevisit ke rumah peserta didik untuk memberikan arahan tentang pentingnya pendidikan kepada peserta didik maupun orang tuanya.

Namun jika dari awal orangtua siswa keberatan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas maka sekolah tidak keberatan. Berdasarkan data yang dari angket yang diberikan pada siswa tidak ada yang keberatan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas. Namun jika ada siswa yang tidak masuk maka peran guru Bimbingan Konseling inilah yang dapat memberikan motivasi siswa sehingga anak - anak terhindar anak putus sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas selama masa pandemi COVID-19 ini terdapat kendala. Kendala yang dialami adalah masih ada beberapa siswa yang abai terhadap penggunaan masker. Sehingga para guru dan karyawan ekstra keras dalam pengawasan. Guru mata pelajaran dalam menyampaikan pembelajaran secara luring dengan penyampaian

materi terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan.

Setelah materi diberikan, maka akan terjadi interaksi antara guru dengan siswa dalam sebuah diskusi atau tanya jawab. Sedangkan penugasan dilakukan dengan melalui googleform. Demikian juga penilaian ulangan harian (PH) dengan memanfaatkan media teknologi. Sebagai kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas. Penyampaian yang bervariasi tersebut membuat peserta didik tertarik dalam pembelajaran. Guru selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Pembelajaran di musim pandemi ini guru dan peserta didik saling memahami kesulitan yang ada, tidak seperti pembelajaran secara normal. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembelajaran di masa Pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas SMP N 1 Jepon menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pembelajaran, dengan mengacu protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Penutup

Implementasi Kebijakan Bupati tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Coronavirus Desiase of 2019 di SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah sudah berjalan secara optimal dari indikator komunikasi berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya, mempertimbangkan proses penyampaian kebijakan, pemahaman para pelaksana kebijakan, serta konsistensi aturan yang tidak membingungkan pelaksana. Sehingga sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan orang tua peserta didik berjalan baik. Indikator ketersediaan sumber daya dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dengan terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang terampil dan kompeten dalam bidang masing-masing dan sumber daya anggaran untuk sarana protokol kesehatan yang sesuai aturan Mendikbud . Indikator disposisi berupa kepatuhan para pelaksana, pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil, penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan yang berprestasi. Sedangkan untuk indikator struktur birokrasi pembuatan Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Procedures-SOP), yang baik dan penyebaran tanggungjawab pada pelaksana kebijakan.

Daftar pustaka

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Akib, Haedar, 2010, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar.
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- Aunurrahman. (2013). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Dadang Sufianto, 2015, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Depdiknas .2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional*.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. Volume 2 Nomor 1 Halm 55-61.
- Edwards III, George C, 2003, *Implementing Public Policy*, Jakarta
- Fathoni, A., & Suyahman. (2018). *The Improvement of Social Science Learning 12 Quality Through Applying The Integrated Social Interaction With Modified Behavior (ISOMOKAKU) Learning Model in Elementary School*. Journal of Education Social Science, 9(2), 175–179.
- Kor, H., Aksoy, H., & Eerbay, H. (2014). *Comparison of the Proficiency Level of the Course Materials (Animations, Videos, Simulations, E-Books) Used In Distance Education*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 854–860. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.150> Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Lenar, S., Artur, F., Ullubi, S., & Nailya, B. (2014). *Problems And Decision In The Field Of Distance Education*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 131, 111–117. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.088>
- Lestari, P. A. S., & Gunawan. (2020). *The Impact of Covid-19 Pandemic on Learning Implementation of Primary and Secondary School Levels*. Indonesian Journal of

- Elementary and Childhood Education, 1 (2), 58–63.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah(PP) (2010) Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Priyono Budi Santoso, L. M. W., Hyun, C. C., & Putri, R. S. (2020). *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. *Journal Education Psychology and Counseling*, 2 (1), 1–12
- Rahmawati, (2014). *The Effect of Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Real Manipulation as a Moderating Variable*. *International Journal of Management, Economics and Social Sciences* 3(2), 59–78.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19*.
- Syafaruddin,
Syafaruddin (2008), *Efektivitas kebijakan pendidikan : konsep, strategi dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifudin, A. S. (2020). *Implementasi pembelajaran daring Untuk meningkatkan Mutu pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing*. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5 (1), 31–34.
- Suwardi, (2022) *Menejemen Evaluasi Kebijakan*. Dalam Ariyanto (editor) *Kebijakan Publik*. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatra Barat.
<https://globaleksekutifteknologi.co.id/kebijakan-publik/>
- Tahir, Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi*

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, Mhd. dan Isril, 2013, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta
- Varshneya, A. K. (2017). *Distance Learning through ICT: Benefits and Challenges*. ADR Journals, 7–9.
- Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijaksanaan Edisi Kedua Dari Fomulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wanda Aprilla, *Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Mengenai Keberhasilan dan Dampak Terhadap Peserta Didik*, FKIP Universitas Lambung Mangkurat wanda.aprilla181012@gmail.com
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak*. Journal of Travel Medicine, 1–4.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).